

## Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Anggota (Himapel Pala) Himpunan Mahasiswa Dan Pelajar Padang Laweh

Ferlin Safira<sup>1</sup>, Kartika Rachma Sari<sup>2</sup>, Yuli Antina Aryani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Accounting Sector Public Department of State Polytechnic of Sriwijaya, Indonesia

Email: [ferlinsafira9@gmail.com](mailto:ferlinsafira9@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 OPD Pemerintah Kota Palembang. Metode pengumpulan data adalah sampel jenuh dengan menggunakan kuesioner kepada 29 OPD Pemerintah Kota Palembang. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25. Temuan peneliti menyarankan bahwa instansi pemerintah harus bertanggung jawab atas kinerjanya berdasarkan pemanfaatan sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pengendalian internal. Akuntabilitas kinerja pemerintah dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti kemampuan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,709, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh sebesar 70,9 persen terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Kata Kunci:** kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

**Abstract:** This study aims to determine the effect of resource competence on the use of information technology and government internal control systems. The population in this study were 29 OPD Palembang City Government. Data collection method is saturated sample using a questionnaire to 29 OPD Palembang City Government. The multiple linear regression analysis in this study was carried out using SPSS version 25. Researchers' findings suggest that government agencies should be held accountable for their performance based on their utilization of human resources, technology, and an internal control system. Government performance accountability is affected by elements such as human resources capabilities, information technology use, and government internal control systems. According to the adjusted R-squared value of 0.709, human resources, information technology, and government internal control systems account for 70.9 percent of the influence on government agency performance accountability.

**Keyword:** competence of human resources, utilization of information technology, government internal control system and performance accountability of government agencies.

### PENDAHULUAN

Setiap instansi memiliki kewajiban untuk melaksanakan AKIP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa "AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik". Pelaksanaan AKIP saat ini berpedoman pada peraturan tersebut. Tingkat implementasi AKIP dievaluasi setiap tahun. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dulu berpedoman pada Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2012 dan sekarang berpedoman pada Permen PAN-RB No. 12 Tahun 2015. AKIP Palembang EMAS DARUSSALAM 2023 adalah semacam komitmen untuk mengikuti Result-Oriented Performance Agreement yang menawarkan informasi tentang tanggung jawab atas komitmen dalam tata kelola, implementasi kebijakan, dan pencapaian tujuan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa banyak organisasi kelembagaan daerah (selanjutnya disebut OPD) tidak memenuhi kategori AKIP tingkat AA (Sangat Memuaskan) dan A (Puas) untuk setiap OPD pada tahun 2021, dan ini termasuk OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, sesuai dengan hasil penilaian.

**Tabel 1**  
**Nilai LAKIP Pemeintah Kota Palembang Tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi
2017	B	B
2018	B	B
2019	B	B
2020	BB	B
2021	BB	B

Sumber : Menpan RB, 2021

Dapat diamati pada tabel 1 di atas, kalau nilai laporan kinerja Pemerintah Kota Palembang sejak lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 terus mendapatkan kategori B (baik). Capaian nilai B yang diraih Pemerintah Kota Palembang ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Palembang telah dinilai baik. Walaupun begitu, Pemerintah Kota Palembang masih belum dapat mencapai target yang tertuang pada RPJMD Pemerintah Kota Palembang tahun 2018-2023 yaitu dengan kategori BB sejak tahun 2020 yang kemudian pada tahun 2022-2023 ini

akan meningkat menjadi kategori A (memuaskan).

Salah satu faktor yang mempengaruhi AKIP yaitu Kompetensi SDM. Pada AKIP Pemerintah Kota Palembang dijelaskan bahwa optimalisasi pengembangan mutu sumber daya manusia menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan sebagai fokus pembangunan Kota Palembang. Pelaksanaan AKIP memerlukan keterlibatan sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah yang menguasai bidang tanggung jawabnya masing-masing dan berpedoman pada visi misi lembaga. Diperlukan lembaga yang kompeten dan profesional untuk memperkuat pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Permendagri RI No. 02 Tahun 2013.

Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang menguntungkan, menurut penelitian sebelumnya oleh Ramadhanis dan Ira Novianty (2020). Hal ini menunjukkan bahwa entitas pemerintah lebih bertanggung jawab atas kinerjanya ketika sumber daya manusianya memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Seperti yang ditunjukkan Septiyani (2020), Zulfiandri (2017), dan Sukarno (et al. 2020), kapabilitas suatu perangkat memiliki pengaruh yang besar, sehingga kapabilitas suatu instrumen dapat meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja fiskal pemerintah.

Pada masa saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Pada AKIP Pemerintah Kota Palembang terdapat hambatan yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi oleh tenaga ahli baik dalam pengembangan sarana dan prasarana maupun strategi dalam memberikan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, khususnya AKIP, didorong untuk menjadi paperless untuk menghemat waktu dan uang. Penyelenggaraan pemerintahan harus bersih, efektif, transparan, dan akuntabel agar sistem e-government seperti Perpres/No. 95 /2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berfungsi dengan baik.

Untuk menjamin penyelenggaraan negara yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab, entitas pemerintah juga harus melaksanakan sistem pengendalian intern PP/No. 60/2008 tentang SPIP yang diperlukan dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Inspektorat daerah kini menjadi pengawas internal pemerintah daerah. Tugas Inspektorat adalah memantau bagaimana dana pemerintah dibelanjakan dan seberapa baik kinerja departemen. Perpres/No. 29/2014 menyebutkan bahwa APIP berfungsi guna memastikan kebenaran laporan kinerja dengan melakukan review secara berkala terhadap laporan-laporan tersebut. AKIP diproyeksikan meningkat ketika entitas pengendalian internal pemerintah bergabung dengan SPIP (Manullang dan Abdullah, 2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilianti(2020), Asmawanti S,dkk(2020),Fitriyani & Helmi Herawati(2019), Abdul Nasir. Arwan Gunawan (2019), menyatkan kalau SPI berdampak positif. Telah ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya oleh Fitrawati et al (2017) kalau SPI berdampak positif dan signifikan pada proses aktivitas total suatu perusahaan, sehingga organisasi dapat memperoleh manfaat. Kemudian Efektivitas operasi organisasi akan meningkat jika karyawan memiliki keyakinan bahwa tugas yang mereka lakukan sedang diselesaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, alhasil perumusan masalah pada riset ini ialah untuk menegetahui secara parsial maupun simultan dari kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini memakai instrument kuesioner sebagai sarana guna meneliti pada populasi atau sampel terpilih. Penulis mengedarkan angket yang terkait dengan variabel independen dan dependen dan variabel dependen kepada pegawai di OPD pemerintah kota Palembang yang bertanggung jawab langsung secara langsung terhadap proses kompetensi SDM dan pemanfaatan IT dan SPIP. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independen yang digunakan ialah Kompetensi Sumber Daya Manusia(X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal(X3). Variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sugiyono (2019: 147) digunakan untuk membangun skala ordinal untuk menilai sikap terhadap pernyataan yang sedang dipertimbangkan dengan Skor. Populasi pada penelitian ini sebanyak 29 OPD di Kota Palembang yang terdiri dari seluruh Badan dan Dinas Kota Palembang. Sensus sampling saline atau non-probabilitas digunakan dalam penyelidikan ini. Seluruh anggota populasi dipakai menjadi sampel dalam sampling jenuh. Setelah pengumpulan data dari semua responden atau sumber data lainnya, proses penelitian kuantitatif melibatkan analisis data (Sugiyono, 2019: 206). Setelah data diolah, digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana membuat atau menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data pada riset ini. Software SPSS dipakai guna mengolah data yang diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis dan menguji hipotesis. Dimungkinkan untuk menggunakan teknik ini setelah memverifikasi keaslian, keandalan, dan kenormalan data yang sedang dipelajari. Validitas/efektivitas kuesioner ditentukan dengan melakukan uji validitas. Sebuah angket dikatakan valid apabila dan hanya jika pertanyaan tersebut diajukan dengan benar. Koefisien korelasi minimal 0,30 dianggap signifikan. Data yang tidak valid harus diperbaiki atau dihilangkan jika koefisien korelasinya kurang dari 0,30 (Sugiyono, 2019: 181).

Dalam hal data yang valid, tidak boleh terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang ditemukan pada subjek penelitian (Sugiyono, 2019: 175), Berikut adalah hasil uji efikasi:

a. “Jika  $r$  hitung Positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir pertanyaan tersebut valid.

b. Jika  $r$  hitung negatif dan  $r$  hitung  $< r$  tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid”.

Keberhasilan studi ini dievaluasi melalui penggunaan kuesioner yang meneliti banyak aspek kemampuan sumber daya manusia instansi pemerintah, penggunaan TI, mekanisme pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja. Perangkat lunak pemrosesan data Statistical Product and Service Solutions (SPSS) dapat digunakan untuk memverifikasi keakuratan klaim ini.

**Tabel 4**

**Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)**

Item Pertanyaan	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$ (n=30)	Keterangan
X1.1	0,807	0,3061	Valid
X1.2	0,517	0,3061	Valid
X1.3	0,847	0,3061	Valid
X1.4	0,748	0,3061	Valid
X1.5	0,752	0,3061	Valid
X1.6	0,617	0,3061	Valid
X1.7	0,818	0,3061	Valid
X1.8	0,534	0,3061	Valid
X1.9	0,795	0,3061	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 bisa diamati hasil pengujian validitas yang dilaksanakan pada Sembilan pernyataan yang dipakai pada variabel kompetensi SDM yaitu Valid.

**Tabel 5**

**Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)**

Item Pertanyaan	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$ (n=30)	Keterangan
X2.1	0,563	0,3061	Valid
X2.2	0,766	0,3061	Valid
X2.3	0,579	0,3061	Valid
X2.4	0,685	0,3061	Valid
X2.5	0,795	0,3061	Valid
X2.6	0,855	0,3061	Valid
X2.7	0,723	0,3061	Valid
X2.8	0,790	0,3061	Valid
X2.9	0,769	0,3061	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2022

Pada uji validitas, kesembilan asersi yang berkaitan dengan variabel penggunaan teknologi informasi adalah

**Tabel 6**

**Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)**

Item Pertanyaan	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$ (n=30)	Keterangan
X3.1	0,542	0,3061	Valid
X3.2	0,755	0,3061	Valid
X3.3	0,662	0,3061	Valid
X3.4	0,543	0,3061	Valid
X3.5	0,637	0,3061	Valid
X3.6	0,746	0,3061	Valid
X3.7	0,762	0,3061	Valid
X3.8	0,480	0,3061	Valid
X3.9	0,730	0,3061	Valid
X3.10	0,755	0,3061	Valid
X3.11	0,620	0,3061	Valid
X3.12	0,737	0,3061	Valid

valid, seperti terlihat pada Tabel 5.

Sumber: Output SPSS diolah, 2022

Berlandaskan Tabel 6, seluruh 15 pernyataan dalam variabel sistem pengendalian intern pemerintah telah lulus uji validitas.

Pada 12 asersi yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, uji validitas menemukan kebenarannya,

**Tabel 7**

**Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Item Pertanyaan	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$ (n=30)	Keterangan
Y.1	0,849	0,3061	Valid
Y.2	0,873	0,3061	Valid
Y.3	0,867	0,3061	Valid
Y.4	0,854	0,3061	Valid
Y.5	0,858	0,3061	Valid
Y.6	0,697	0,3061	Valid
Y.7	0,868	0,3061	Valid
Y.8	0,711	0,3061	Valid
Y.9	0,883	0,3061	Valid
Y.10	0,854	0,3061	Valid
Y.11	0,665	0,3061	Valid
Y.12	0,780	0,3061	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2022

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7

**Uji Reabilitas**

Butir-butir dalam laporan yang dianggap valid diuji reliabilitasnya. Menggunakan koefisien Alpha Cronbach, kami mengevaluasi ketergantungan instrumen pengukuran dalam penelitian ini. Seluruh metode pengumpulan data penelitian dinilai dari koefisien reliabilitas penelitian. Nilai Cronbach's Alpha < 0,60 dianggap buruk, sedangkan 0,7 dapat diterima dan > 0,8 dianggap baik.

Uji reliabilitas pada variabel independen dan dependen, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8, telah

**Tabel 8**

**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,875	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,886	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	0,901	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,952	Reliabel

Sumber: Output SPSS, 2022

menghasilkan hasil yang reliabel.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Deskripsi Objek Penelitian**

Responden pada penelitian ini terdapat 116 Responden, dimana terdapat 4 responden dari masing-masing OPD Pemerintah Kota Palembang seperti Sekretaris, Kasubag (Kepala Sub Bagian) ataupun staf pelaksana di masing-masing bagian perencanaan dan keuangan yang berjumlah 4 orang responden yang memenuhi kriteria. Hal ini menyebabkan penyebaran 116 kuesioner, yang berasal dari 29 OPD. Berikut hasil survei, serta persentase responden yang mengembalikannya

**Tabel 9**

**Rincian Pengembalian Kuesioner**

Kuesioner yang Disebar	Kuesioner yang Kembali	Tingkat Pengembalian
116	102	87,9%

**Karakteristik Responden**

Tabel 10 menampilkan demografi dari 116 orang yang mengisi survei:

**Tabel 10**  
**Karakteristik Responden**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Umur		
	a. ≤ 40 tahun	54	54,94
	b. 41 – 50 tahun	30	29,41
	c. ≥ 50 tahun	18	17,64
	Total	102	100
2.	Lama Bekerja		
	a. 1 – 2 tahun	12	11,76
	b. 3 – 5 tahun	24	23,52
	c. 6 – 10 tahun	20	19,60
	d. ≥ 10 tahun	46	45,09
	Total	102	100
3.	Pendidikan Terakhir		
	a. S3	2	1,96
	b. S2	38	37,25
	c. D4/ S1	52	50,98
	d. D3	5	4,90
	e. D1	0	0
	f. SLTA/ Sederajat	5	4,90
	Total	102	100
4.	Latar Belakang Pendidikan		
	a. Akuntansi	9	8,82
	b. Non Akuntansi	93	91,18
	Total	102	100

Sumber: Data yang diolah, 2022

Guna mengetes poin parameter yang diberikan oleh model, perlu dilakukan pengujian hipotesis klasik. Uji tersebut mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji linieritas. Tidak ada masalah dengan pengujian hipotesis klasik pada riset ini ketika menggunakan SPSS versi 25, menurut temuan tes.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Dibawah ini Tabel 11, hasil regresi linier adalah sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.244	.203		-1.199	.234		
	X1	.308	.066	.309	4.641	.000	.650	1.538
	X2	.140	.061	.139	2.278	.025	.778	1.285
	X3	.579	.071	.555	8.187	.000	.628	1.592

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2022

Model persamaan regresi linier berganda Priyatno (2018:118) didasarkan pada Tabel 11 Bagian B kolom koefisien tidak baku dan berbunyi yaitu:

$$Y = -0,244 + 0,308 X1 + 0,140 X2 + 0,579 X3 + e$$

**Keterangan :**

- Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia  
X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi  
X3 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  
e : Error

Persamaan regresi yang diperoleh bisa diuraikan dibawah ini:

1. Nilai konstanta sebesar -244 bernilai negatif artinya apabila variabel bebas yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah nilainya 0 maka skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang akan semakin berkurang
2. Terdapat hubungan positif antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, artinya jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia meningkat sebesar 1 maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 1 dan 30,8 persen. Asumsikan bahwa variabel independen lainnya konstan.
3. Data menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berkorelasi positif dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan koefisien regresi sekitar 0,140. Artinya jika data menunjukkan bahwa variabel penggunaan teknologi informasi meningkat sebesar 1, maka kewajiban kinerja instansi pemerintah meningkat dengan jumlah yang sama. Diasumsikan bahwa semua variabel lainnya adalah konstan.
4. Ketika sistem pengendalian intern pemerintah meningkat 1, kinerja instansi pemerintah dipertanyakan, meningkatkan nilai kewajiban sebesar 57%, koefisien regresi untuk SPIP adalah 0,579, menunjukkan hubungan satu arah antara variabel SPIP dan kinerja instansi pemerintah variabel akuntabilitas. Sisa dari variabel independen diyakini tetap.
5. Standar *error* menyatakan tingkat kesalahan pengganggu.

**Pembahasan**

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

“ $H_0$  = Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

$H_1$  = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”

Pengujian hipotesis peneliti menyatakan terdapatnya korelasi positif antara variabel kompetensi SDM dengan outcome. Karena poin thitung variabel kapabilitas SDM (X1) sekitar 4,641 dan nilai probabilitas melebihi 1,660 dengan poin prob  $0,000 < 0,05$  maka dikatakan berdampak positif dan signifikan pada kinerja instansi pemerintah kota Palembang. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Akibatnya, baik  $H_0$  maupun  $H_1$  dapat dikesampingkan. Dari sini terlihat kalau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, dan sikap sumber daya manusia penelitian. Bertanggung jawab atas kinerja instansi pemerintah kota Palembang. Semakin menguntungkan suatu perusahaan, semakin baik sumber daya manusianya.

Hal ini berdasarkan Permendagri RI/No. 02/2013 yang menyampaikan kalau “Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional”. Sesuai dengan hal itu, Skorková (2016) menyampaikan kalau “Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti kualitas, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kompeten”. Kemampuan seseorang untuk berhasil menyelesaikan tugas dan menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi disebut sebagai kompetensi mereka.

Pelaksanaan AKIP harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan berlandaskan ketentuan hukum yang sah, sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Ini berarti bahwa sumber daya yang digunakan harus konsisten, kompeten, dan tersedia sebagai komponen yang komprehensif dari perkiraan orang-orang yang melakukan pekerjaan dan tenaga mereka dalam profesinya masing-masing. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, kompetensi aparat pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap AKIP, antara lain Putri (2015), Razi (2017), Ahyari dan Ayem (2019), dan Hasannudin (2019).

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang**

“ $H_0$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
 $H_1$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi positif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran”

Uji hipotesis teknologi informasi menemukan nilai thitung 2,278 lebih besar dari 1,660 dan probabilitas  $0,000 > 0,05$ , keduanya menyatakan kalau kinerja instansi pemerintah meningkat ketika mereka menggunakan teknologi. Artinya penggunaan teknologi berdampak pada kinerja instansi pemerintah. Mengambil kepemilikan atas tindakan seseorang memiliki dampak yang besar dan positif. Palembang adalah nama ibu kota. Ada kemungkinan besar bahwa salah satu hipotesis ( $H_0$  atau  $H_1$ ) salah. Manajemen data, manajemen peralatan, dan pemeliharaan hanyalah beberapa contoh dari banyak cara di mana topik ini memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini mempengaruhi akuntabilitas

entitas pemerintah kota Palembang melalui penggunaan pengelolaan data. Instansi Pemerintah Kota Palembang akan lebih akuntabel jika tetap menggunakan teknologi informasi (X2), begitu pula sebaliknya.

Sesuai dengan Perpres/No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituliskan kalau “Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi”.

Pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran data adalah semua fungsi teknologi informasi yang diatur. Menyelesaikan tugas dan menyiapkan laporan keuangan dapat menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. Erviana (2017) menyampaikan kalau “Teknologi Informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. Pemanfaatan teknologi digunakan oleh aparat pemerintahan dalam mengelola data dan menyimpan informasi”. Seseorang yang memegang kendali, biasanya pemerintah, memiliki hak untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan wilayah khusus mereka, termasuk kabupaten dan kota, hal ini sesuai dengan Stewardship theory. Karena itu, pemerintah kota harus melaporkan sesuai dengan aturan dan menahan diri untuk tidak memasukkan informasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka yang membaca laporan keuangan. Laporan keuangan lebih akurat dan relevan ketika disiapkan. menggunakan teknologi informasi Penggunaan teknologi informasi memudahkan pemerintah daerah (pengelola) untuk melapor kepada pemerintah pusat (kepala daerah), sehingga keterlambatan pelaporan akan berkurang berkat penggunaan teknologi.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang**

“ $H_0$  = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kota Palembang tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang

$H_1$  = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”

Sistem pengendalian intern (X3) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang yang didukung oleh nilai t-hitung sebesar 8,187 (lebih besar dari 1,660) dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan signifikan. Ada kemungkinan besar bahwa salah satu hipotesis ( $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima). Akibatnya, data dalam penelitian ini menyatakan kalau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Instansi pemerintah kota Palembang akan memiliki standar tanggung jawab yang lebih tinggi jika sistem pengendalian internal kota (X3) lebih ditingkatkan.

Pemerintah daerah menggunakan SPI untuk memastikan operasi yang transparan dan akuntabel. PP RI/No. 60/2008 tentang SPI yang menyampaikan kalau “Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”. Dengan menggunakan SPI pemerintah (SPIP), diharapkan bisa meramalkan dan mendeteksi kemungkinan penyimpangan atau kelainan dalam organisasi secara dini (built-in control) Fungsi pengawasan secara otomatis dilakukan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di instansi pemerintah, terlepas dari apakah karyawan menyadarinya atau tidak.

Serangkaian perbuatan dan aktivitas harus dilaksanakan oleh pimpinan pemerintah dan semua karyawan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif, sebagaimana dikendalikan oleh peraturan sistem pengendalian internal pemerintah. Aktivitas. Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Direktur/Walikota dan pejabat pemerintah lainnya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa SPI yang efektif dan efisien diterapkan, memastikan bahwa pelaporan keuangan akurat dan bahwa target manajemen operasional terpenuhi dengan tetap berpegang pada semua hukum dan ketentuan yang sah. Semakin besar pengendalian internal suatu instansi pemerintah, semakin baik kualitas kerjanya. Agar AKIP bisa berkembang, perlu adanya SPIP yang memadai, seperti yang dikemukakan dalam penelitian Afrina pada tahun 2015.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang**

Kemampuan Sumber Daya Manusia (X1), Penggunaan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) merupakan faktor independen pada riset ini, bersama dengan variabel dependen yaitu tanggung jawab instansi pemerintah kota Palembang atas kerjanya (Y). Karena nilai Fhitung > Ftabel (82.919) > 3,09 pada hasil regresi linier berganda maka dapat dinyatakan berpengaruh cukup positif. Tingkat signifikansi juga menunjukkan bahwa 0,000 < 0,05 atau 5% dari populasi. Kapasitas SDM, penggunaan IT, dan SPIP semuanya dapat dianggap sebagai faktor independen. Sehingga berpengaruh baik dan cukup besar terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas instansi pemerintah kota Palembang. Ada kemungkinan besar bahwa salah satu hipotesis ( $H_0$  atau  $H_1$ ) salah. Penggunaan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah sendiri yang lebih baik akan memudahkan mereka untuk bertanggung jawab atas peningkatan kinerja mereka. Terbukti dari hasil uji koefisien determinasi, hal ini benar adanya. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel seperti kapasitas manusia dan penggunaan teknologi informasi dan SPIP mempunyai besaran 0,709, yang menunjukkan sejauh mana faktor-faktor tersebut berdampak. Variabel akuntabilitas pemerintah Kota Palembang sebesar 0,709 atau 70,9 persen. Faktor lain yang belum dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sisanya sebesar 0,291 atau 29,1 persen.

#### **Kesimpulan**

Para penulis mencapai temuan berikut sesuai dengan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilaporkan dalam bab sebelumnya:

1. Kemampuan sumber daya manusia berdampak positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka bisa diringkas kalau semakin mampu sumber daya manusia instansi pemerintah, semakin transparan akuntabilitas kinerja mereka.
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi telah membawa dampak besar dan positif pada akuntabilitas pemerintah. Perihal ini menggambarkan kalau semakin banyak entitas pemerintah yang menggunakan teknologi informasi, semakin akuntabel mereka.
3. Pengaruh penting dan positif dari sistem pengendalian internal pemerintah federal adalah pada kemampuan pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas pemerintah lebih akuntabel untuk kinerja mereka ketika sistem pengendalian internal mereka lebih efektif.
4. Kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme pengendalian intern pemerintah semuanya berdampak pada variabel terikat (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
5. Tanggung jawab kinerja organisasi sebesar 70,9 persen dipengaruhi oleh sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internalnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir, Arwan Gunawan. (2019). Implementasi *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Industrial Research workshop and National Seminar*.
- Afrina, D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. *JOMFEKON*.
- Andri Zulfiandri. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada OPD di Pemerintah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* Volume 2 No 1 April 2017 Hal 102-125.
- Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kurniawan. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol.9, No.2, Juli 2020.
- Dri Asmawati S, Aisyah Mayang Sari, Vika Fitranita, dan Indah Oktari Wijayanti. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal of Applied Accounting and Taxation* Vol.5, No1 Maret 2020.
- Erviana. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kota Palu). *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 4, April 2017 hlm 182-193.
- Fitrawati, Abdul Kahar dan Muh. Iqbal A. (2017). Pengaruh Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong). *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 Hal 177-184.
- Gebyvia Septiyani, Taufeni Taufik, Julita Julita. (2020). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Apakah Dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini* Vol.1, No.2, Juli 2020, pp, 183-200.
- Hasannudin, M. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Survei Pada SKPD Kabupaten Bandung Barat). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ilmiyyah, N. M, Dewata, E., dan Sarikadarwati.(2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 147-162.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Laporan Kinerja (LKJIP) Pemerintah Kota Palembang Tahun 2017-2020.
- Novita Fitriyani dan Helmi Herawati. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Akuntansi Unihaz-Jaz* ISSN 2620-8555-Vol1.No2 Desember 2019.
- Nurhasanah, S. (2018). *Praktikum Statistika 1 untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Putri. E. M. N. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Universitas Riau*.
- Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Universitas Riau*.

- Siti Aisyah Sukarno, Jantje J. Tinangon, Steven J. (2020). Tangkuman. Pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*. Volume 2, Nmber 2, Year 2020 Hal 110-117.
- Skorkava, Z. (2016). *Competency Models in Public Sector*. 3<sup>rd</sup> *Internasional Coference pn New Challenge in Management and Organization*, 226-234
- Suci Ramadhania, Ira Novianty. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Industrial Research workshop and National Seminar Bandung*, 26-27 Agustus 2020.
- Sugiyono,(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.